BAB III

KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

JAMSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

3.1 Sejarah Singkat PT. Telekomunikasi Indonesia

TELKOM adalah suatu bahan usaha bernama Post-en Telegraafdlenst yang didirikan dengan Staatsblad No.52 tahun 1884. penyelenggaraan telekomunikasi di Hindia Belanda pada waktu itu pada mulanya diselenggarakan oleh swasta. Bahkan sampai tahun 1905 tercatat 38 perusahaan telekomunikasi, yang pada tahu 1906 diambil alih oleh pemerintahan Hindia Belanda dengan berdasarkan Staatsblad No. 395 tahun 1906. sejak itu berdirilah post, Telegraaaf en Telefoondients atau disebut PTT-Dienst. PTT-Dienst ditetapkan sebagai perusahaan sebagai perusahaan Negara berdasarkan Staatsblad No. 419 tahun 1972 tentang Indonesia Bedrijvenwet (I.B.W, Undang-Undang Perusahaan Negara).

Jawatan PTT ini berlangsung sampai dikeluarkannya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 19 tahun 1960 oleh pemerintah Republik Indonesia, tenetang persyaratan suatu perusahaan Negara dan PTT-Dienst memenuhi syarat untuk tetap menjadi suatu perusahaan Negara (PN) kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah No.240 tahun 1961, tentang pendirian perusahaan Negara Post dan Telekomunikasi disebutkan , bahwa perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi disebutkan bahwa Perusahan Negara Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 I.B dilebur kedalam perusahaan Negara Pos Dan Telekomunikasi (PN. Pos dan Telekomunikasi).

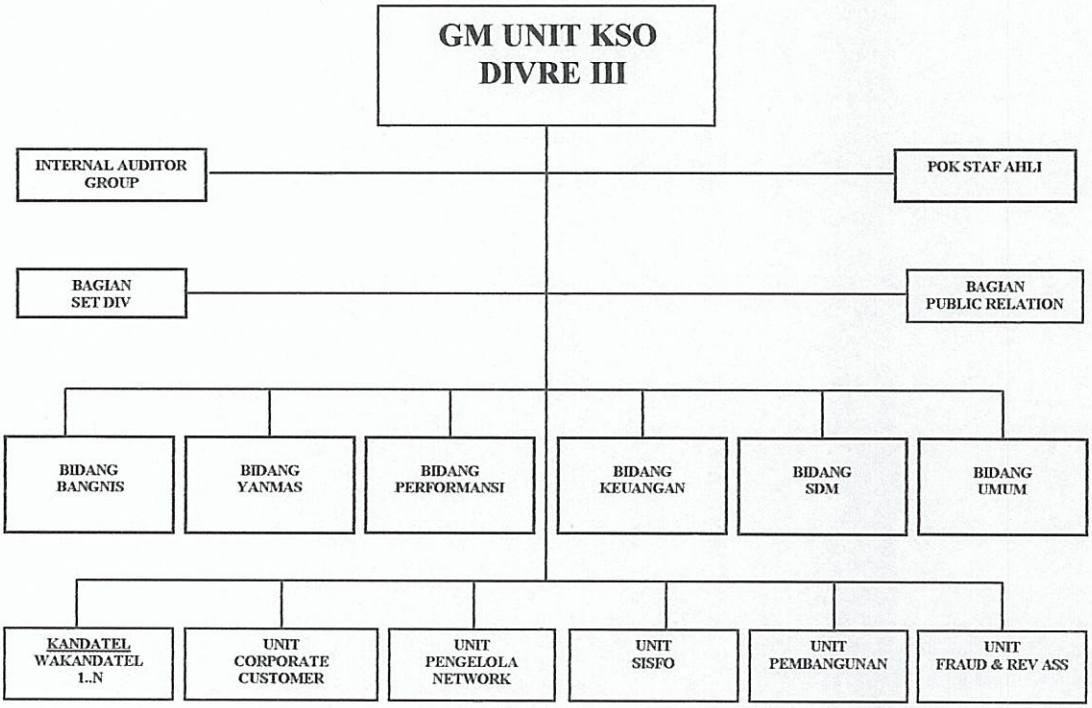
Dalam perkembangan selanjutnya pemerintah memandang perlu untuk membagi PN Pos dan Telekomunikasi menjadi Dua (2) Perusahaan Negara Yang Berdiri Sendiri, Berdasarkan peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1965, maka berdirilah perusahaan Pos Dan Giro (PN Pos Dan Giro) dan pendirian perusahaan Negara telekomunikasi (PN. Telekomunikasi) diatur dalam peraturan pemerintah No. 30 tahun 1965. bentuk inipun dikembangkan menjadi Perusahaan Umun (Perum) Telekomunikasi melalui peraturan pemerintah No. 36 Tahun 1974. dalam

Peraturan tersebut dinyatakan pula Perusahaan Umum Telekomunikasi sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi untuk umum, baik hubungan telekomunikasi Dalam Negeri maupuin Luar Negeri. Tenteng hubungan Telekomunikasi Luar Negeri pada saat itu juga diselenggarakan oleh PT. Indonesian Satelite Corporation (Indosat), yang masih berstatus perusahaan Asing, takni dari Amerika American Cable & Radio Corporation, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan peraturan perundangan Negara bagian Delaware, Amerika Serikat.

Seluruh saham PT. Indosat dengan modal asing ini pada akhir tahun 1960 dibeli oleh Negara Republik Indonesia dari American Cable & Radio Corporation, dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa telekomunikasi untuk umum, pemerintah mengeluarkan peraturan Pemerintah No. 53 tahun 1980 tentang telekomunikasi untuk umum yang isinya tentang perubahan atas peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1974, berdasarkan peraturan pemerintah No. 53 tahun 1980, PERUMTEL ditetapkan sebagai badan usaha yang berwenang menyelenggarakan telekomunikasi untuk Umum dalam Negeri dan Indosat ditetapkan sebagai badan usaha Penyelenggara Telekumunikasi untuik umum Internasional.

Memasuki Repelita V Pemerintah merasakan perlunya percepatan pembangunan Telekomunikasi, karena sebagai infrastruktur diharapkan dapat memacu pembangunan sector lainnya, selain hal tersebut penyelenggaraan telekomunikasi membutuhkan manajemen yang lebih professional, oleh sebab itu perlunya menyesuaikan bentuk perusahaan. Untuk itu berdasarkan peraturan pemerintah No. 25 tahun 1991, maka bentuk Perusahaan Umum (PERUM) dialihkan menjadi perusahaan Perseroan (Persero), sebagaimana dimaksud dalan Undang-Undang No. 9 tahun 1969, sejak itu berdirilah Perusahaan perseroan (Persero) Telekomunikasi Indonesia atau TELKOM.

3.2 Struktur Organisasi PT.Telekomunikasi Indonesia DIVRE III



Tabel 1 : Struktur Organisasi PT.Telekomunikasi Indonesia DIVRE III

3.3 Bagian Pelayanan SDM

Mengkoordinasi penyediaan layanan SDM DIVRE III sehingga proses layanan SDM berjalan lancar, efektif, efisien sesuai prosedur.

3.4 Perencanaan Pelatihan (*Training Plan*)

Perencanaan pelatihan berpedoman pada hasil analisis kebutuhan pelatihan (TNA). Produk perencanaan pelatihan terdiri dari jenis-jenis pelatihan, nama dan jumlah peserta serta besaran budget yang dituangkan dalam Buku Training Plan. Produk perencanaan pelatihan selanjutnya digunakan untuk pengembangan materi pelatihan, penyusunan jadwal pelatihan, perencanaan dan pelaksanaan,serta evaluasi efektivitas pelatihan.

3.5 Penyelenggaraan Pelatihan (*Training Delivery)*

3.5.1 Ruang Lingkup dan Tujuan

Prosedur ini mendefinisikan kegiatan dan tanggung jawab karyawan, mulai dari penerimaan nota dinas, pemanggilan,pelatihan,melaksanakan pelatihan/seminar sampai dengan menyerahkan copy sertifikat.

Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penyelenggaraan training mengacu pada hasil deteksi kebutuhan pelatihan karyawan (TNA).

3.5.2 Uraian Instruksi Kerja

- Prinsip penyelenggaraan pelatihan adalah mengacu pada *Buku Training Plan* dan *Strategic Training Plan.*
- Produk/kegiatan-kegiatan dalam penyelenggaraan pelatihan :
  - Membuat jadwal / waktu pelatihan
  - Memantau kehadiran pengajar dan peserta, kesiapan materi pelatihan, kesiapan fasilitas belajar mengajar.
- Membuat laporan penyelenggaran pelatihan, meliputi : kehadiran peserta, kehadiran pengajar, pemanfaatan fasilitas / sarana / prasarana, respon / evaluasi peserta terhadap kualitas materi pelatihan, kualitas pengajar, kualitas penyelenggara, kualitas akomodasi.

Menginput data pelatihan pegawai berdasarkan copy sertifikat pelatihan ke dalam HRIS.

3.6 Penyebaran Hasil Pelatihan

Ruang Lingkup Dan Tujuan

Prosedur ini mendefinisikan kegiatan dan tanggung jawab Manajer, Kabag SDM Datel dan Manager Lini mulai dari mengidentifikasi Laporan Penyelenggaraan Pelatihan , menentukan pelatihan mana yang memerlukan BIT (penyebaran hasil training)sampai pada pelaksanaan dan laporan BIT.

Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hasil latih yang diperoleh karyawan dapat diketahui juga oleh karyawan lain yang terkait dengan pekerjaannya.

3.7 Visi Misi DIVRE III

Tantangan 2004 disikapi sebagai peluang untuk pencanangan fase pemulihan total di bidang operasi dan pelayanan (*total operational and service recovery*). Kondisi lingkungan luar sudah serba berubah serta menuntut bukan hanya respon yang cepat, tetapi juga berkualitas, dari sisi kemampuan individu diyakini bahwa Divre III akan sanggup menghadapi tantangan. Tuntutan kerja keras sudah menjadi hal biasa, sementara ide-ide cerdas juga tumbuh subur di tengah kondisi yang menuntut perubahan serba cepat.

Untuk meningkatkan kinerjanya, manajemen Divre III tidak hanya menekankan pentingnya kerja keras, melainkan juga prinsip hidup dalam keseimbangan (*life in harmony*), baik dalam pengertian keseimbangan antara membangun karir dengan keharmonisan keluarga, maupun dalam pengertian keserasian jalannya proses-proses kerja di dalam perusahaan.

Visi Korporasi

"To become a dominant InfoCom player in the Region" .

Misi Divre III

- Kepada Pelanggan: Menyediakan jaringan dan jasa InfoCom terbaik;
- Kepada Karyawan: Membentuk SDM yang profesional;
- Kepada Pemilik: Memberikan pertumbuhan dan pencapaian laba yang signifikan;
- Kepada Pemerintah: Menyediakan fasilitas telekomunikasi nasional, membayar pajak dan menyerap tenaga kerja;
- Kepada Mitra Bisnis: Bersama-sama memperoleh bagian keuntungan.

3.7.1 Visi SDM DIVRE III

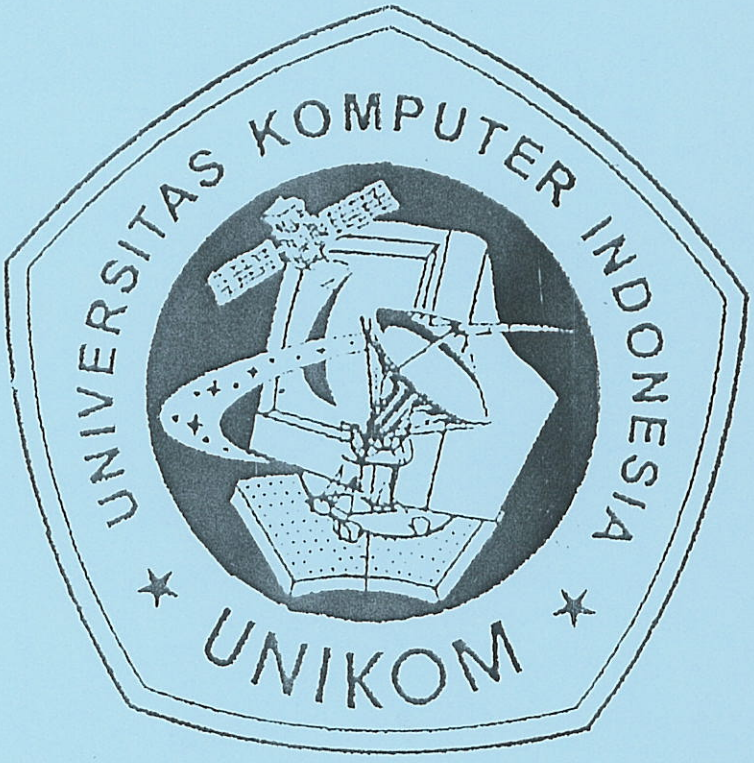
"Menjadikan SDM DIVRE III sebagai competitive advantage perusahaan dan center of excellent di bidang Infocom"

3.7.2 Misi SDM DIVRE III

1. Menciptakan SDM DIVRE III yang professional & sejahtera
2. Menciptakan SDM yang transparan, fleksibel, responsive, adil & orientasi kepada pelanggan.

3.7.3 Tujuan SDM DIVRE III

Meningkatkan nilai perusahaan melalui profesionalisme SDM.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM